

Negosiasi Politik Perbatasan dan Kehidupan Masyarakat di Kepulauan Talaud

Syaloom Ch. I. N. Oping^{a,1}, Arin A. Sualang^{b,2},

^{a,b} Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia,

e-mail: syaloomchristian23@gmail.com¹, Arinameliasualang@gmail.com²,

Correspondence author: Arinameliasualang@gmail.com

Keywords: ABSTRACT

Talaud Islands, maritime identity, border communities, boundary negotiations, maritime space, Indonesia-Philippines.

The Talaud Islands are Indonesia's outermost border area that borders directly with the Philippines and has a strategic position in the maritime network of the Sulawesi Sea and the Pacific Ocean. In the context of border societies, the sea not only functions as the territorial boundary of the country, but also as a social, economic, cultural, and historical space that plays a role in the formation of community identity. This study aims to analyze the relationship between marine space, community identity, and the dynamics of boundary negotiations that take place in the Talaud Islands. The research uses a qualitative approach with a literature study method. Data were obtained from various scientific sources that discuss border communities, maritime culture, Indonesia-Philippines cross-border relations, and border development. The results of the study show that the identity of the Talaud people was formed through a long interaction with the marine space that had taken place before the formation of modern state borders. Geographical proximity to the Philippines gave birth to a network of kinship, trade, population mobility, and cultural exchange that formed cross-border identities. In daily life, people view the sea as a connecting space, while the state interprets it as a sovereign space that must be supervised. These differences in perspectives gave rise to the ongoing boundary negotiation process. In addition, border policies such as the Border Crossing Agreement (BCA) and the Border Trade Agreement (BTA) have not fully accommodated the socio economic dynamics of the society that continues to develop. This study concludes that the border in the Talaud Islands is a negotiation space that brings together maritime identity, state interests, and community life strategies. The sea is a central element in the formation of identity and the sustainability of the socio-economic life of border communities.

1. PENDAHULUAN

Wilayah perbatasan sering dipahami sebagai ruang geografis yang menandai berakhirnya kedaulatan suatu negara dan dimulainya yurisdiksi negara lain. Namun dalam perspektif geografi manusia dan studi perbatasan kontemporer, perbatasan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai garis pemisah teritorial, melainkan sebagai ruang sosial yang mempertemukan berbagai kepentingan politik, ekonomi, budaya, dan identitas. Dalam konteks ini, masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan berada pada posisi yang unik karena mengalami secara langsung interaksi antara kebijakan negara dengan realitas kehidupan sehari-hari yang sering kali melampaui batas-batas administratif dan politik. Kepulauan Talaud merupakan salah satu kawasan perbatasan strategis Indonesia yang terletak di bagian paling utara Sulawesi Utara dan berbatasan langsung dengan Filipina. Posisi geografis tersebut menjadikan Talaud sebagai wilayah yang tidak hanya memiliki arti penting dalam konteks kedaulatan negara, tetapi juga dalam dinamika hubungan sosial dan ekonomi lintas batas. Berbeda dengan

pandangan negara yang melihat perbatasan sebagai ruang kontrol dan pengawasan, masyarakat Talaud selama berabad-abad telah memandang laut sebagai ruang kehidupan yang menghubungkan mereka dengan komunitas-komunitas lain di kawasan Laut Sulawesi dan Filipina Selatan. Sebelum terbentuknya batas negara modern, mobilitas manusia, perdagangan, hubungan kekerabatan, serta pertukaran budaya telah berlangsung secara intens melalui jalur-jalur maritim yang menghubungkan berbagai pulau di kawasan tersebut.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa laut memiliki posisi sentral dalam kehidupan masyarakat Talaud. Laut bukan hanya sumber penghidupan bagi nelayan dan masyarakat pesisir, tetapi juga menjadi ruang budaya yang membentuk identitas sosial masyarakat. Pengetahuan lokal mengenai pelayaran, musim, wilayah penangkapan ikan, dan hubungan antar pulau menjadi bagian dari budaya maritim yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks ini, identitas masyarakat Talaud tidak dapat dipisahkan dari hubungan historis mereka dengan laut. Kehidupan masyarakat dibentuk oleh pengalaman kolektif sebagai komunitas maritim yang hidup di antara berbagai jalur perdagangan dan mobilitas manusia yang telah berlangsung jauh sebelum hadirnya batas negara Indonesia dan Filipina. Namun, kehadiran negara melalui berbagai kebijakan perbatasan seperti *Border Crossing Agreement* (BCA) dan *Border Trade Agreement* (BTA) menghadirkan dimensi baru dalam kehidupan masyarakat perbatasan. Perjanjian-perjanjian tersebut bertujuan mengatur mobilitas penduduk dan aktivitas perdagangan lintas batas agar tetap berada dalam kerangka hukum negara. Akan tetapi, perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan menunjukkan bahwa berbagai aktivitas lintas batas sering kali melampaui ketentuan formal yang telah ditetapkan. Bagi masyarakat Talaud, laut tetap menjadi ruang konektivitas yang memungkinkan terjadinya hubungan ekonomi, sosial, dan budaya dengan Filipina, sementara bagi negara laut merupakan ruang kedaulatan yang harus diawasi dan diamankan. Perbedaan cara pandang ini menciptakan proses negosiasi yang terus berlangsung dalam kehidupan masyarakat perbatasan.

Selain persoalan identitas dan konektivitas lintas batas, masyarakat Talaud juga menghadapi berbagai tantangan struktural berupa keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya transportasi, kerentanan ekonomi nelayan, serta ketergantungan terhadap sumber daya laut. Sebagai wilayah kepulauan terluar, Talaud sering menghadapi persoalan aksesibilitas yang berdampak pada pelayanan publik, distribusi barang, dan peluang ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perbatasan tidak hanya berkaitan dengan isu keamanan dan kedaulatan, tetapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat yang hidup di dalamnya. Oleh karena itu, memahami kehidupan masyarakat perbatasan memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada negara, tetapi juga pada pengalaman hidup masyarakat sebagai pelaku utama yang sehari-hari berinteraksi dengan ruang perbatasan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas isu perbatasan Indonesia Filipina, sebagian besar masih berfokus pada aspek tertentu seperti keamanan wilayah, perdagangan lintas batas, pengelolaan perbatasan, pembangunan infrastruktur, atau identitas masyarakat secara parsial. Kajian yang secara khusus menghubungkan laut sebagai ruang hidup, identitas masyarakat, dan negosiasi batas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Talaud masih relatif terbatas. Padahal ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan membentuk karakteristik khas masyarakat perbatasan di Kepulauan Talaud. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana laut berperan dalam pembentukan identitas masyarakat Talaud, bagaimana masyarakat memaknai dan menegosiasikan keberadaan batas negara dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana dinamika sosial, ekonomi, dan budaya di wilayah perbatasan membentuk kehidupan masyarakat Kepulauan Talaud. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi geografi politik, studi perbatasan, dan kajian masyarakat maritim di Indonesia, khususnya dalam memahami perbatasan sebagai ruang hidup yang dinamis dan terus dinegosiasikan oleh masyarakat yang menghuninya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berupaya memahami dan menginterpretasikan fenomena sosial yang berkaitan dengan hubungan antara ruang laut, identitas masyarakat, dan dinamika perbatasan di Kepulauan Talaud. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak berfokus pada pengukuran statistik, melainkan pada pemaknaan, interpretasi, dan analisis terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Studi literatur digunakan sebagai metode utama untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai referensi akademik yang membahas masyarakat perbatasan, identitas maritim, pengelolaan wilayah perbatasan, konektivitas lintas batas, kehidupan nelayan, keamanan maritim, serta pembangunan kawasan perbatasan Indonesia dan Filipina.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber ilmiah berupa jurnal, buku, artikel penelitian, prosiding, dan dokumen akademik yang berkaitan dengan wilayah perbatasan Kepulauan Talaud. Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri atas lima belas literatur yang secara langsung membahas ruang laut, identitas masyarakat, negosiasi batas, pembangunan wilayah perbatasan, serta hubungan Indonesia–Filipina. Selain itu, data dalam artikel ini diperoleh melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, membaca, mengklasifikasikan, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Setiap sumber dianalisis berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat perbatasan, identitas maritim, hubungan lintas batas, pembangunan wilayah perbatasan, dan pengelolaan ruang laut. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan menghubungkan berbagai temuan dari literatur yang telah dikaji.

Tahapan analisis meliputi. *Pertama*, reduksi data. Bagian ini yaitu memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian mengenai laut, identitas, dan negosiasi batas. *Kedua*, kategorisasi data. Bagian ini yaitu mengelompokkan temuan ke dalam tiga tema utama penelitian, yaitu: (1) laut sebagai ruang sosial dan ruang kehidupan masyarakat Talaud; (2) identitas masyarakat perbatasan dan hubungan lintas batas Indonesia–Filipina; (3) negosiasi batas dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan keamanan. *Ketiga*, interpretasi data. Tahapan ini menafsirkan hubungan antara berbagai temuan literatur untuk memahami dinamika kehidupan masyarakat perbatasan Kepulauan Talaud. *Terakhir*, penarikan kesimpulan. Tahapan ini yaitu menyusun sintesis hasil analisis guna menjelaskan keterkaitan antara ruang laut, identitas masyarakat, dan negosiasi batas dalam kehidupan masyarakat Kepulauan Talaud. Sementara itu, penelitian ini menggunakan perspektif geografi politik dan studi perbatasan dengan menempatkan laut sebagai ruang yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai batas kedaulatan negara sekaligus sebagai ruang sosial yang membentuk identitas dan kehidupan masyarakat. Melalui kerangka tersebut, penelitian menganalisis bagaimana masyarakat Talaud membangun identitas maritim, mempertahankan hubungan lintas batas, serta menegosiasikan berbagai kebijakan negara dalam kehidupan sehari-hari di kawasan perbatasan Indonesia–Filipina.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Laut sebagai Ruang Hidup dan Pembentuk Identitas Masyarakat Talaud

Dalam berbagai kajian geografi politik dan studi masyarakat maritim, laut sering dipahami tidak hanya sebagai bentang alam yang memisahkan suatu wilayah dengan wilayah lainnya, tetapi juga sebagai ruang sosial yang membentuk kehidupan masyarakat yang berada di sekitarnya. Perspektif ini sangat relevan untuk memahami kehidupan masyarakat Kepulauan Talaud. Sebagai wilayah kepulauan yang berada di perbatasan Indonesia dan Filipina, Talaud memiliki karakter geografis yang menjadikan laut sebagai unsur dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan luas wilayah laut yang jauh lebih besar dibandingkan wilayah daratan, laut tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga menjadi ruang budaya, ruang interaksi sosial, dan ruang pembentukan identitas kolektif masyarakat.

Hubungan masyarakat Talaud dengan laut memiliki akar sejarah yang panjang. Jauh sebelum terbentuknya negara-bangsa modern dan penetapan batas teritorial Indonesia–Filipina, masyarakat di kawasan ini telah membangun jaringan pelayaran, perdagangan, dan komunikasi antarpulau melalui Laut Sulawesi. Laut menjadi medium yang menghubungkan berbagai komunitas di Kepulauan Talaud, Sangihe, Mindanao, dan wilayah-wilayah lain di kawasan Asia Tenggara maritim. Dalam konteks tersebut, laut tidak dipahami sebagai penghalang, melainkan sebagai penghubung yang memungkinkan terjadinya mobilitas manusia, pertukaran budaya, dan pembentukan jaringan sosial lintas wilayah. Oleh karena itu, memahami masyarakat Talaud tanpa memahami laut berarti mengabaikan unsur paling fundamental yang membentuk kehidupan mereka.



Gambar 1. Posisi Strategis Kepulauan Talaud dalam Jaringan Maritim Indonesia Filipina

Sumber: Hasil Studi Dokumentasi

Temuan ini memperlihatkan bahwa identitas masyarakat Talaud pada dasarnya merupakan identitas maritim. Identitas tersebut tercermin dalam pola mata pencaharian yang didominasi oleh sektor perikanan dan kelautan, dalam pengetahuan lokal mengenai arus laut, musim, cuaca, serta wilayah tangkap ikan, maupun dalam berbagai praktik budaya yang berkaitan dengan kehidupan bahari. Laut tidak hanya menyediakan sumber penghidupan, tetapi juga menjadi sumber pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun. Pengetahuan mengenai laut menjadi modal sosial yang memungkinkan masyarakat bertahan hidup di tengah berbagai keterbatasan geografis dan ekonomi yang melekat pada wilayah kepulauan terluar.



Gambar 2. Aktivitas Nelayan Tradisional di Kawasan Perairan Kepulauan Talaud

Sumber: Hasil Studi Dokumentasi

Lebih jauh, laut juga membentuk cara masyarakat Talaud memandang ruang dan wilayah. Berbeda dengan perspektif negara yang menempatkan batas sebagai garis pemisah kedaulatan, masyarakat perbatasan cenderung melihat laut sebagai ruang yang menghubungkan berbagai komunitas yang memiliki kedekatan historis dan kultural. Kedekatan masyarakat Talaud dengan komunitas di Filipina Selatan merupakan contoh nyata bagaimana ruang laut menciptakan hubungan sosial yang melampaui batas-batas politik negara. Hubungan kekerabatan, perdagangan, migrasi, dan pertukaran budaya yang telah berlangsung selama beberapa generasi menunjukkan bahwa identitas masyarakat Talaud tidak hanya dibentuk oleh kedudukannya sebagai warga negara Indonesia, tetapi juga oleh pengalaman historis mereka sebagai masyarakat maritim yang hidup dalam jaringan sosial lintas batas. Di sisi lain, ketergantungan yang tinggi terhadap laut juga menempatkan masyarakat Talaud pada posisi yang rentan. Berbagai penelitian mengenai nelayan di Pulau Miangas menunjukkan bahwa kondisi cuaca, gelombang tinggi, keterbatasan teknologi penangkapan ikan, serta akses pasar yang terbatas menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Kerentanan tersebut semakin diperkuat oleh posisi geografis Talaud sebagai wilayah terluar yang relatif jauh dari pusat-pusat ekonomi nasional. Namun demikian, kondisi tersebut justru memperlihatkan kemampuan adaptasi masyarakat dalam mengembangkan berbagai strategi bertahan hidup, baik melalui diversifikasi mata pencaharian, pemanfaatan jaringan sosial, maupun penguatan hubungan ekonomi lintas batas.

Dari perspektif yang lebih kritis, temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara cara negara dan masyarakat memaknai laut. Negara memandang laut sebagai ruang kedaulatan yang harus diawasi, diamankan, dan dibatasi melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan perbatasan. Sebaliknya, masyarakat Talaud memandang laut sebagai ruang kehidupan yang menyediakan akses terhadap sumber daya, hubungan sosial, dan peluang ekonomi. Perbedaan cara pandang ini menjadi titik awal munculnya berbagai bentuk negosiasi batas yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Dengan demikian, laut di Kepulauan Talaud tidak dapat dipahami semata-mata sebagai wilayah geografis atau batas negara, melainkan sebagai ruang hidup yang membentuk identitas, menghubungkan komunitas, dan menentukan keberlangsungan kehidupan masyarakat perbatasan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa laut merupakan fondasi utama dalam pembentukan identitas masyarakat Talaud. Identitas maritim yang berkembang tidak lahir hanya karena kedekatan geografis dengan laut, tetapi terbentuk melalui proses historis yang panjang yang melibatkan mobilitas, perdagangan, kekerabatan, dan interaksi budaya lintas wilayah. Oleh karena itu, dalam konteks Kepulauan Talaud, laut bukan sekadar lanskap fisik, melainkan ruang sosial yang terus membentuk cara masyarakat memahami diri mereka, berinteraksi dengan komunitas lain, dan memaknai keberadaan perbatasan negara dalam kehidupan sehari-hari.

3.2. Identitas Masyarakat Perbatasan dalam Ruang Lintas Negara

Wilayah perbatasan pada umumnya dipahami sebagai ruang yang mempertemukan dua kedaulatan negara yang berbeda. Namun dalam realitas kehidupan masyarakat, perbatasan tidak selalu menciptakan pemisahan yang tegas sebagaimana tergambar dalam peta politik. Di Kepulauan Talaud, identitas masyarakat justru terbentuk melalui interaksi yang berlangsung melampaui batas-batas negara. Kedekatan geografis dengan Filipina Selatan, sejarah mobilitas antarpulau, hubungan kekerabatan, serta aktivitas perdagangan yang telah berlangsung selama berabad-abad menjadikan masyarakat Talaud memiliki karakter identitas yang khas sebagai masyarakat perbatasan. Oleh karena itu, identitas masyarakat Talaud tidak dapat dipahami hanya melalui perspektif kewarganegaraan formal, melainkan harus dilihat sebagai hasil interaksi antara ruang laut, sejarah, budaya, dan pengalaman hidup di kawasan perbatasan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara masyarakat Talaud dan Filipina Selatan telah berlangsung jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia maupun Filipina. Dalam konteks historis, Laut Sulawesi berfungsi sebagai jalur mobilitas yang menghubungkan berbagai komunitas di kawasan Asia Tenggara maritim. Mobilitas tersebut memungkinkan terjadinya migrasi, perkawinan, perdagangan, dan pertukaran budaya yang membentuk jaringan sosial lintas batas. Akibatnya, masyarakat di kawasan perbatasan tidak hanya memiliki hubungan sebagai tetangga geografis, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas sosial yang saling terhubung melalui sejarah dan hubungan keluarga.



Gambar 3. Posisi Kepulauan Talaud dan Hubungan Lintas Batas Indonesia–Filipina

Sumber: Hasil Studi Dokumentasi

Fenomena tersebut terlihat jelas dalam kajian mengenai dinamika masyarakat perbatasan Indonesia dan Filipina yang menunjukkan bahwa identitas masyarakat tidak selalu sejalan dengan batas politik negara. Banyak keluarga yang memiliki anggota keluarga di kedua sisi perbatasan. Hubungan kekerabatan lintas negara tetap dipertahankan melalui kunjungan keluarga, kegiatan keagamaan, maupun aktivitas sosial lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa batas negara tidak sepenuhnya mampu memutus hubungan sosial yang telah terbentuk secara historis. Bagi masyarakat Talaud, kedekatan budaya dan hubungan keluarga sering kali menjadi faktor yang lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan keberadaan garis batas negara yang bersifat administratif. Kajian mengenai diaspora Indonesia di kawasan Laut Sulawesi semakin memperkuat argumen tersebut. Diaspora masyarakat Sangir dan Talaud yang menetap di Filipina memperlihatkan bahwa identitas dapat berkembang secara multidimensional. Mereka tetap mempertahankan bahasa, tradisi, dan memori kolektif mengenai daerah asal, meskipun telah lama hidup di lingkungan sosial yang berbeda. Dalam situasi ini, identitas tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat ganda dan dinamis. Seseorang dapat menjadi warga negara Filipina secara administratif, tetapi tetap mempertahankan ikatan budaya dan emosional dengan Indonesia, khususnya dengan daerah asal keluarganya di Sangihe dan Talaud.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa identitas masyarakat perbatasan merupakan hasil negosiasi yang terus berlangsung antara identitas lokal, identitas nasional, dan identitas transnasional. Identitas lokal tercermin dalam keterikatan terhadap budaya Talaud dan tradisi maritim yang diwariskan secara turun-temurun. Identitas nasional muncul melalui keterikatan sebagai warga negara Indonesia serta kehadiran berbagai institusi negara di wilayah perbatasan. Sementara itu, identitas transnasional berkembang melalui hubungan sosial, ekonomi, dan budaya yang melintasi batas negara. Ketiga bentuk identitas tersebut tidak selalu saling bertentangan, tetapi sering kali hidup berdampingan dalam kehidupan masyarakat perbatasan.



Gambar 4. Budaya Maritim dan Kehidupan Sosial Masyarakat Perbatasan Talaud

Sumber: Hasil Studi Dokumentasi

Dari perspektif geografi politik, fenomena ini menunjukkan bahwa identitas tidak selalu mengikuti batas teritorial negara. Negara modern cenderung mengasumsikan bahwa identitas nasional terbentuk secara linear sesuai dengan batas kedaulatan yang telah ditetapkan. Namun pengalaman masyarakat

Talaud menunjukkan bahwa identitas dapat berkembang melampaui batas tersebut. Laut yang secara politik diposisikan sebagai batas negara justru menjadi medium yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat dan memungkinkan terbentuknya identitas lintas batas (*cross-border identity*). Dalam konteks ini, laut berfungsi sebagai ruang integrasi sosial yang memperkuat hubungan antar komunitas di kawasan perbatasan. Di sisi lain, keberadaan kebijakan perbatasan seperti *Border Crossing Agreement* (BCA) menunjukkan pengakuan negara terhadap realitas sosial tersebut. Perjanjian ini lahir karena adanya hubungan historis dan sosial yang tidak dapat dipisahkan begitu saja oleh batas negara. Melalui mekanisme tersebut, negara berupaya mengakomodasi kebutuhan masyarakat untuk tetap mempertahankan hubungan sosial lintas batas tanpa mengabaikan aspek kedaulatan. Hal ini menunjukkan bahwa identitas masyarakat perbatasan tidak terbentuk secara terpisah dari negara, melainkan melalui proses interaksi dan negosiasi yang kompleks antara kepentingan masyarakat dan kebijakan negara.

Secara lebih kritis, kondisi masyarakat Talaud memperlihatkan bahwa perbatasan bukan sekadar ruang pemisah, melainkan ruang perjumpaan berbagai identitas. Kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa identitas nasional Indonesia tidak menghapus identitas lokal dan hubungan lintas batas yang telah berkembang selama berabad-abad. Sebaliknya, berbagai identitas tersebut saling berinteraksi dan membentuk karakter khas masyarakat perbatasan. Dengan demikian, identitas masyarakat Talaud dapat dipahami sebagai identitas maritim-perbatasan yang lahir dari pengalaman hidup di antara laut, negara, dan jaringan sosial lintas negara. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa identitas masyarakat Talaud merupakan konstruksi sosial yang dibentuk oleh sejarah mobilitas maritim, hubungan kekerabatan lintas batas, budaya bahari, dan keberadaan negara di kawasan perbatasan. Identitas tersebut bersifat dinamis dan terus dinegosiasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, memahami masyarakat Talaud tidak cukup hanya melalui perspektif kewarganegaraan atau batas negara, tetapi juga melalui hubungan-hubungan sosial yang berkembang di ruang laut yang menghubungkan Indonesia dan Filipina. Identitas inilah yang kemudian menjadi dasar bagi munculnya berbagai bentuk negosiasi batas antara kepentingan negara dan realitas kehidupan masyarakat perbatasan yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

3.3. Negosiasi Perbatasan: Antara Kepentingan Negara dan Realitas Kehidupan Masyarakat

Negosiasi batas merupakan salah satu fenomena yang paling menonjol dalam kehidupan masyarakat perbatasan. Di Kepulauan Talaud, batas negara tidak hanya hadir sebagai garis imajiner yang membedakan wilayah Indonesia dan Filipina, tetapi juga hadir dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat. Sebagai wilayah yang berada di garis terdepan kedaulatan Indonesia, Talaud menjadi ruang pertemuan antara kepentingan negara untuk menjaga integritas wilayah dengan kebutuhan masyarakat yang secara historis memiliki hubungan erat dengan komunitas di seberang perbatasan. Dalam konteks ini, perbatasan tidak dapat dipahami sebagai sesuatu yang statis, melainkan sebagai ruang negosiasi yang terus berlangsung antara negara dan masyarakat. Secara historis, hubungan masyarakat Talaud dengan Filipina telah terbentuk jauh sebelum lahirnya batas negara modern. Kedekatan geografis, mobilitas maritim, hubungan kekerabatan, dan aktivitas perdagangan telah menciptakan keterhubungan yang kuat antara masyarakat di kedua wilayah. Namun, ketika negara modern mulai menetapkan batas-batas teritorial yang lebih tegas, muncul kebutuhan untuk mengatur berbagai aktivitas lintas batas tersebut melalui instrumen hukum dan kebijakan negara. Salah satu bentuk pengaturan tersebut adalah melalui *Border Crossing Agreement* (BCA) dan *Border Trade Agreement* (BTA) antara Indonesia dan Filipina.

Kedua perjanjian tersebut dirancang untuk mengakomodasi hubungan sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan sekaligus menjaga kedaulatan masing-masing negara. Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi BCA dan BTA tidak selalu berjalan sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat di lapangan. Bagi masyarakat Talaud, hubungan lintas batas bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan bagian dari kehidupan sosial yang telah berlangsung turun-temurun. Aktivitas kunjungan keluarga, perdagangan tradisional, kegiatan keagamaan, hingga mobilitas

nelayan sering kali berlangsung melampaui kerangka administratif yang ditetapkan negara. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara logika negara yang berorientasi pada kontrol dan regulasi dengan logika masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan hidup dan hubungan sosial.



Gambar 5. Kawasan Perbatasan Laut Indonesia–Filipina sebagai Ruang Interaksi dan Pengawasan

Sumber: Hasil Studi Dokumentasi

Persoalan tersebut semakin terlihat dalam aktivitas perdagangan lintas batas. Berbagai kajian menunjukkan bahwa kedekatan geografis Talaud dengan Filipina sering kali membuat masyarakat lebih mudah mengakses barang-barang dari wilayah Filipina dibandingkan dari pusat-pusat ekonomi di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan hubungan ekonomi lintas batas berkembang secara alami berdasarkan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, perkembangan tersebut tidak selalu diikuti oleh pembaruan regulasi yang memadai. Beberapa ketentuan dalam BTA bahkan dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan ekonomi masyarakat perbatasan saat ini. Akibatnya, masyarakat sering berada pada posisi yang harus menyesuaikan kebutuhan hidup mereka dengan regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi realitas sosial dan ekonomi di kawasan perbatasan. Selain aspek ekonomi, negosiasi batas juga terlihat dalam sektor perikanan dan pemanfaatan sumber daya laut. Laut yang bagi masyarakat merupakan ruang kehidupan sering kali dipandang negara sebagai wilayah yang harus dijaga dari berbagai bentuk pelanggaran, seperti illegal fishing, penyelundupan, dan pelanggaran batas wilayah. Dalam konteks ini, nelayan menjadi kelompok yang paling merasakan dampak langsung dari keberadaan batas negara. Mereka harus berhadapan dengan berbagai aturan mengenai wilayah tangkap, pengawasan keamanan, serta risiko pelanggaran batas yang terkadang sulit dihindari karena karakter

laut yang terbuka dan dinamis. Situasi ini memperlihatkan bahwa batas negara tidak hanya menjadi persoalan politik internasional, tetapi juga memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir.

Dari perspektif keamanan, negara memandang kawasan Talaud sebagai wilayah strategis yang harus dijaga melalui berbagai mekanisme pengawasan. Kehadiran TNI Angkatan Laut, pos-pos pengamanan, serta patroli maritim merupakan bentuk nyata upaya negara mempertahankan kedaulatan wilayah. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keamanan perbatasan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan militer dan pengawasan. Masyarakat lokal memiliki peran yang sangat penting karena mereka merupakan pihak yang paling memahami kondisi wilayah serta dinamika sosial yang terjadi di kawasan perbatasan. Dengan demikian, pengelolaan perbatasan yang efektif memerlukan sinergi antara negara dan masyarakat. Secara lebih kritis, kondisi di Talaud menunjukkan bahwa perbatasan merupakan arena tarik-menarik antara dua cara pandang yang berbeda. Negara melihat perbatasan sebagai instrumen untuk menegaskan kedaulatan dan menjaga keamanan nasional. Sebaliknya, masyarakat melihat perbatasan sebagai bagian dari ruang hidup yang harus tetap memungkinkan berlangsungnya hubungan sosial, ekonomi, dan budaya yang telah terbentuk sejak lama. Ketika kedua kepentingan tersebut bertemu, maka yang terjadi bukanlah pemisahan yang tegas, melainkan proses negosiasi yang terus berlangsung dalam berbagai bentuk kehidupan sehari-hari.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa batas negara pada dasarnya merupakan konstruksi politik yang terus diproduksi dan dinegosiasikan melalui praktik sosial masyarakat. Keberadaan BCA dan BTA, aktivitas perdagangan lintas batas, mobilitas nelayan, hubungan kekerabatan, hingga pengawasan keamanan maritim menunjukkan bahwa perbatasan di Talaud bukan sekadar garis yang membelah dua negara. Sebaliknya, perbatasan merupakan ruang interaksi yang mempertemukan kepentingan negara dengan kebutuhan masyarakat. Dalam ruang inilah masyarakat Talaud secara terus-menerus menegosiasikan identitas, mobilitas, dan strategi kehidupannya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa negosiasi batas di Kepulauan Talaud tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum dan kedaulatan, tetapi juga menyangkut bagaimana masyarakat mempertahankan kehidupan sosial dan ekonominya di tengah berbagai regulasi negara. Dengan demikian, perbatasan Indonesia–Filipina di Kepulauan Talaud merupakan ruang yang dinamis, di mana kepentingan negara dan realitas kehidupan masyarakat saling berinteraksi, beradaptasi, dan bernegosiasi secara berkelanjutan.

3.4. Talaud sebagai Beranda Depan Indonesia di Kawasan Asia Pasifik

Pembahasan mengenai laut, identitas, dan negosiasi batas pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa Kepulauan Talaud tidak dapat dipahami hanya sebagai wilayah perbatasan yang berada di ujung utara Indonesia. Dalam perkembangan geopolitik kontemporer, Talaud memiliki posisi yang jauh lebih strategis karena berada pada persimpangan antara kepentingan lokal, nasional, dan regional. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Filipina serta berada di jalur perairan yang menghubungkan Indonesia dengan kawasan Asia Pasifik menjadikan Talaud sebagai salah satu wilayah yang memiliki arti penting dalam konteks kedaulatan negara, konektivitas regional, dan pembangunan kawasan perbatasan. Oleh karena itu, Talaud tidak lagi tepat dipandang sebagai daerah pinggiran (*periphery*), melainkan sebagai beranda depan Indonesia yang berhadapan langsung dengan dinamika kawasan Asia Pasifik. Konsep mengenai Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Asia Pasifik memberikan perspektif baru dalam melihat posisi Kepulauan Talaud. Selama bertahun-tahun, wilayah perbatasan sering dipersepsikan sebagai daerah yang jauh dari pusat kekuasaan dan pembangunan. Namun, perubahan orientasi pembangunan nasional menunjukkan bahwa kawasan perbatasan mulai dipandang sebagai aset strategis yang memiliki potensi besar dalam mendukung hubungan internasional, perdagangan, dan integrasi regional. Dalam konteks ini, Talaud memiliki keunggulan geografis yang tidak dimiliki oleh banyak wilayah lain di Indonesia karena kedekatannya dengan Filipina dan jalur pelayaran internasional di kawasan Pasifik Barat.

Posisi strategis tersebut terlihat secara nyata pada Pulau Miangas yang merupakan salah satu pulau terluar Indonesia. Miangas tidak hanya berfungsi sebagai penanda batas kedaulatan negara, tetapi juga menjadi simbol kehadiran Indonesia di kawasan utara Nusantara. Keberadaan pulau-pulau terluar

seperti Miangas menunjukkan bahwa wilayah perbatasan memiliki arti penting dalam menjaga integritas teritorial negara sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik kawasan. Dalam perspektif geografi politik, pulau-pulau terluar merupakan titik di mana konsep negara, wilayah, dan identitas nasional diwujudkan secara konkret dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.



Gambar 6. Pulau Miangas: Titik Terluar Indonesia di Perbatasan Laut Indonesia–Filipina

Sumber: Hasil Studi Dokumentasi

Meskipun memiliki posisi strategis, berbagai penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Talaud masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan. Keterbatasan infrastruktur transportasi, konektivitas antarpulau, akses layanan publik, dan distribusi logistik menjadi persoalan yang terus dihadapi oleh masyarakat. Karakter wilayah kepulauan yang tersebar menyebabkan biaya pembangunan menjadi lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia. Akibatnya, kesenjangan pembangunan antara wilayah perbatasan dan pusat-pusat ekonomi nasional masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius. Kondisi ini menunjukkan bahwa posisi strategis suatu wilayah tidak selalu diikuti oleh tingkat pembangunan yang memadai. Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah berupaya mengubah paradigma pembangunan kawasan perbatasan. Jika sebelumnya wilayah perbatasan lebih banyak dipandang dari perspektif keamanan (*security approach*), kini pembangunan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*). Pembangunan pelabuhan, peningkatan konektivitas transportasi, penguatan layanan publik, serta pengembangan ekonomi kelautan menjadi bagian dari upaya memperkuat kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan. Pergeseran paradigma ini menunjukkan bahwa menjaga kedaulatan negara tidak cukup hanya melalui pengamanan wilayah, tetapi juga melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.

Lebih jauh, Talaud memiliki potensi besar untuk menjadi simpul konektivitas antara Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Kedekatan geografis dengan Filipina membuka peluang kerja sama dalam bidang perdagangan, perikanan, pariwisata, dan ekonomi maritim. Potensi tersebut menjadi

semakin penting di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap kawasan Indo-Pasifik yang saat ini menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan geopolitik global. Dalam konteks ini, Talaud dapat berperan sebagai gerbang yang menghubungkan Indonesia dengan jaringan ekonomi regional yang lebih luas. Dari perspektif yang lebih kritis, pembangunan Talaud tidak boleh hanya dipahami sebagai upaya memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan. Pembangunan juga harus memperhatikan karakter sosial dan budaya masyarakat yang telah lama hidup dalam ruang maritim dan lintas batas. Berbagai kebijakan pembangunan perlu mempertimbangkan bahwa masyarakat Talaud bukan sekadar objek pembangunan, melainkan aktor utama yang memiliki pengetahuan lokal, jaringan sosial, dan pengalaman historis yang penting dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Dengan demikian, pembangunan yang berorientasi pada masyarakat akan lebih mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat dibandingkan pendekatan yang hanya berfokus pada kepentingan geopolitik negara.

Jika dikaitkan dengan keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini, maka posisi Talaud sebagai beranda depan Indonesia sesungguhnya merupakan hasil pertemuan antara tiga elemen utama, yaitu laut sebagai ruang kehidupan, identitas masyarakat perbatasan, dan negosiasi batas yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Laut membentuk pola hidup dan identitas masyarakat, perbatasan menciptakan dinamika hubungan antara negara dan masyarakat, sedangkan pembangunan menjadi sarana untuk menghubungkan kepentingan keduanya. Ketiga elemen tersebut menunjukkan bahwa Talaud bukan sekadar wilayah terluar Indonesia, tetapi merupakan ruang strategis yang mencerminkan bagaimana negara, masyarakat, dan laut saling berinteraksi dalam membentuk kehidupan kawasan perbatasan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kepulauan Talaud memiliki posisi yang sangat penting dalam konteks nasional maupun regional. Sebagai wilayah perbatasan yang berada di gerbang Asia Pasifik, Talaud tidak hanya berperan dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial, ekonomi, dan budaya yang menghubungkan Indonesia dengan kawasan sekitarnya. Oleh karena itu, pengembangan Talaud perlu ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas, yaitu sebagai beranda depan Indonesia yang memiliki peran strategis dalam memperkuat identitas maritim bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, dan memperluas keterhubungan Indonesia dengan kawasan Asia Pasifik.

4. KESIMPULAN

Kepulauan Talaud merupakan wilayah perbatasan yang menunjukkan bahwa laut, identitas, dan batas negara memiliki hubungan yang saling memengaruhi dalam membentuk kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai literatur, penelitian ini menemukan bahwa laut tidak hanya berfungsi sebagai ruang geografis atau batas teritorial negara, tetapi juga merupakan ruang hidup yang menjadi sumber penghidupan, sarana mobilitas, media interaksi sosial, serta fondasi pembentukan identitas masyarakat Talaud. Kedekatan masyarakat dengan laut telah melahirkan identitas maritim yang tercermin dalam pola mata pencaharian, pengetahuan lokal, budaya bahari, serta cara pandang masyarakat terhadap ruang dan lingkungan sekitarnya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa identitas masyarakat Talaud tidak terbentuk secara tunggal dalam kerangka negara-bangsa modern. Posisi geografis yang berdekatan dengan Filipina serta sejarah panjang hubungan lintas laut telah melahirkan identitas perbatasan yang bersifat dinamis dan multidimensional. Hubungan kekerabatan, migrasi, perdagangan, dan pertukaran budaya yang berlangsung selama beberapa generasi membentuk jaringan sosial yang melampaui batas politik negara. Akibatnya, identitas masyarakat Talaud berkembang melalui interaksi antara identitas lokal, identitas nasional, dan identitas lintas batas yang terus dinegosiasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa perbatasan Indonesia–Filipina di Kepulauan Talaud bukan sekadar garis pemisah kedaulatan, melainkan ruang negosiasi yang mempertemukan kepentingan negara dengan kebutuhan masyarakat. Berbagai kebijakan seperti *Border Crossing Agreement* (BCA) dan *Border Trade Agreement* (BTA) menunjukkan upaya negara dalam mengatur mobilitas masyarakat

perbatasan. Namun, realitas sosial memperlihatkan bahwa masyarakat tetap mempertahankan hubungan sosial, ekonomi, dan budaya yang telah terbentuk jauh sebelum batas negara ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa batas negara tidak bersifat absolut, melainkan terus dimaknai dan dinegosiasikan melalui praktik sosial masyarakat perbatasan. Di sisi lain, posisi strategis Kepulauan Talaud sebagai wilayah terdepan Indonesia di kawasan Asia Pasifik menjadikan kawasan ini memiliki arti penting tidak hanya dalam konteks kedaulatan negara, tetapi juga dalam pembangunan dan konektivitas regional. Talaud bukan lagi wilayah pinggiran yang terisolasi, melainkan beranda depan Indonesia yang menghubungkan kepentingan nasional dengan dinamika kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itu, pembangunan kawasan perbatasan perlu dilakukan melalui pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada keamanan dan pengawasan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan identitas maritim, serta pengakuan terhadap karakter sosial dan budaya masyarakat perbatasan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kehidupan masyarakat Kepulauan Talaud tidak dapat dipahami hanya melalui perspektif batas negara semata. Laut, identitas, dan perbatasan merupakan tiga unsur yang saling berkaitan dalam membentuk realitas sosial masyarakat. Di antara laut yang menghubungkan dan batas yang memisahkan, masyarakat Talaud terus membangun identitas, mempertahankan relasi sosial, serta menegosiasikan ruang hidupnya dalam konteks lokal, nasional, dan regional. Fenomena inilah yang menjadikan Kepulauan Talaud sebagai representasi penting dari dinamika masyarakat perbatasan di Indonesia.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Azis, M. N. I., Saptaningrum, I., Fawaid, I., & Setiawan, A. M. (2024). Mencari identitas: Dinamika masyarakat perbatasan Indonesia–Filipina, 1975–2014. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 13(1), 175–190. <https://doi.org/10.23887/jish.v13i1.74945>
- Halean, M. G., Lengkong, F. D. J., & Tampi, G. B. (2018). Implementasi kewenangan pemerintah daerah pada pengelolaan wilayah perbatasan antar negara (Studi Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal Administrasi Publik*, 4(62).
- Husain, S., & Baskoro, M. S. (2018). *Negeri di Ujung Utara Nusantara: Sejarah Masyarakat Perbatasan Pulau Miangas Kepulauan Talaud Sulawesi Utara*. Jakarta: Penerbit Komunitas Bambu.
- Maliatja, M., & Sambiran, S. (2019). Implementasi program pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Mamentu, M., & Rares, J. (2018). Evaluasi dampak sosial ekonomi dan politik Border Crossing Agreement pada masyarakat perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 4(1), 89–99.
- Muhidin, S. N. (2019). Penyelesaian sengketa perbatasan yang ditinjau melalui implementasi Border Crossing Agreement antara Indonesia–Filipina (Studi Kasus Pulau Miangas). *Jurnal Transborders*, 2(2), 108–120.
- Niode, B., Rachman, I., & Waworundeng, W. (2021). Implikasi Border Crossing Agreement dan Border Trade Agreement terhadap konektivitas di wilayah perbatasan Indonesia–Filipina .
- Putra, S. B., Legowo, Y. A., Sunny, A. G., & Pratama, S. Y. (2024). Analisis pengawasan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut terkait ancaman keamanan perbatasan laut Kabupaten Kepulauan Talaud–Negara Filipina. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 13(3).
- Sumolang, S., Sampe, S., & Kumayas, N. (2024). *Ruang laut masyarakat Kepulauan Sangihe–Talaud di perbatasan Indonesia–Filipina: Jalur rempah, budaya bahari, hingga tata kelola sumber daya laut*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Wiratri, A. (2024). Diaspora Indonesia lintas Laut Sulawesi: Teritori, kewarganegaraan, dan identitas. *Masyarakat Indonesia*, 50(1), 163–176. <https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8713>